

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan memiliki peran strategis dalam perekonomian, terutama sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkankannya kembali ke sektor produktif. Dalam sistem keuangan Indonesia, keberadaan bank syariah, termasuk Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS), menjadi semakin penting karena tidak hanya menjalankan fungsi intermediasi, tetapi juga mendukung penguatan ekonomi umat, inklusi keuangan, dan pembiayaan sektor usaha mikro dan kecil.¹ Meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui peningkatan produktivitas usaha merupakan salah satu sasaran utama pembiayaan perbankan syariah. Dalam praktiknya, pembiayaan tersebut umumnya disalurkan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk mendukung modal kerja, investasi, atau perluasan kapasitas produksi.²

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan No. 21 Tahun 2008 secara khusus mengatur perbankan syariah. Undang-undang ini mencakup ketentuan mengenai pelaksanaan kegiatan usaha, baik dalam penghimpunan maupun penyaluran dana, serta memuat berbagai larangan yang berlaku bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.³ Struktur perbankan di Indonesia dikelompokkan

¹ Miswan Ansori and others, 'Peran Dan Kontribusi Perbankan Syariah Dalam Perekonomian Indonesia : Tinjauan Histori', *Jurnal Perbankan Syariah Darussalam*, 5.1 (2025), pp. 14–25, doi:10.30739/jpsda.v5i1.3405.

² Ratih Nur, Cahyati Ulfi, and Kartika Oktaviana, 'Efisiensi BPRS Di Indonesia Menggunakan Tahapan Metode Data Envelopment Analysis', *Jurnal Akuntansi Dan Perbankan Syariah*, 2.2 (2025), doi:https://doi.org/10.32332/finansia.v8i2.10179.

³ Usna Nur Indah and others, 'Suitability Isi UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah Dengan Ajaran Hukum Islam', *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9.November (2023), pp. 822–31, doi:https://doi.org/10.5281/zenodo.10091088.

menjadi Bank Umum (Bank umum konvensional dan Bank umum syariah) dan Bank perekonomian rakyat (BPR/BPRS). Perbedaan utama antara bank umum konvensional dan bank umum syariah dengan BPR/BPRS terletak pada keterbatasan BPR/BPRS dalam hal tidak dapat menerima simpanan berupa giro, tidak dapat melakukan kegiatan bisnis dalam valuta asing (kecuali kegiatan usaha penukaran valuta asing tertentu), serta jangkauan operasional yang lebih terbatas dibandingkan bank umum. Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung.⁴

Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) memiliki peran yang cukup besar dalam mendukung perkembangan Usaha Mikro dan Kecil (UMK), baik di wilayah pedesaan maupun perkotaan. Kehadiran BPRS juga semakin memperkaya sektor perbankan syariah, karena lembaga ini menjadi salah satu sarana keuangan yang menyediakan layanan pembiayaan sesuai kebutuhan masyarakat tanpa unsur riba.⁵

BPRS menawarkan prosedur operasional yang ringkas, waktu pemrosesan cepat, skema pembiayaan yang adaptif, serta jaringan cabang yang merata di berbagai lokasi geografis. Menegaskan kontribusi signifikan BPRS terhadap pemberdayaan ekonomi lokal dengan menyediakan akses pembiayaan bagi UMK yang sulit dijangkau oleh bank konvensional. Selanjutnya, BPRS berpotensi besar dalam memajukan inklusi keuangan dan pengembangan sektor.

⁴Otoritas Jasa Keuangan, 'Lembaga Perbankan', 2024 <<https://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/ikhtisar-perbankan/Pages/Lembaga-Perbankan.aspx>>.

⁵ Ulfi Hidayah, Atieq Amjadallah Alfie, and Rosida Dwi Ayuningtyas, '1 , 2 , 3', *Jurnal Manajemen Keuangan Syariah*, 4.2 (2022), pp. 1–13, doi://doi.org/10.32505/ihthyath.v4i2.2041.

Dengan demikian, UMK sebagai pilar utama perekonomian Indonesia mendapat dukungan inklusif dan mudah diakses melalui peran BPRS.⁶

Efisiensi merupakan perbandingan antara input yang digunakan dengan output yang dihasilkan, yaitu sejauh mana suatu input dapat menghasilkan output. Jika sebuah bisnis dapat menghasilkan lebih banyak dengan jumlah input yang sama atau jumlah output yang sama dengan input yang lebih sedikit daripada bisnis lain, maka bisnis tersebut dianggap efisien.⁷ Dengan adanya efisiensi pada lembaga perbankan terutama efisiensi biaya, maka diperoleh tingkat keuntungan yang optimal, penambahan jumlah dana yang disalurkan, biaya lebih kompetitif, peningkatan pelayanan kepada nasabah, keamanan dan kesehatan perbankan yang meningkat.⁸

Salah satu pengukuran efisiensi yang digunakan yaitu Data Envelopment Analysis (DEA). DEA merupakan pendekatan pemrograman linier untuk mengukur efisiensi relatif unit pengambilan keputusan (DMU). Metode ini membandingkan performa satu DMU dengan DMU lain yang memproses input identik guna menghasilkan output serupa, dengan solusi model yang mengindikasikan tingkat efisiensi atau produktivitas relatif antar-unit. DEA mencakup dua model utama pengukuran efisiensi, yaitu CCR dan BCC. Model CCR, yang pertama kali diperkenalkan oleh Charnes, Cooper, dan Rhodes (1978), mengasumsikan rasio skala input-output konstan (Constant Returns to Scale/CRS), dimana

⁶ Habib Almahdaly and Marlina Sussana, 'Penganalisisan Kinerja (BPRS) Wilayah Jawa Timur Dengan Metode Data Envelopment Analisis (DEA) Periode 2022-2024', *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 5.6 (2025), pp. 1740–51 <<http://cerdika.publikasiindonesia.id/index.php/cerdika/index>>.

⁷ Rosi Ariana Putri and Fitri Nur Latifah, 'Analisis Efisiensi Bank Umum Syariah Dengan Metode Dea : Data Envelopment Analysis Periode 2021-2023', *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 6.5 (2025), pp. 1498–1510, doi:1047467/elmal.v6i5.7152.

⁸ Roshyfa Nurdin and others, 'Pengaruh Efisiensi Operasional Dan Kecukupan Modal Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indosia (BEI) Periode', *Jurnal Ekonomi*, 8.2 (2022), pp. 226–34, doi:10.37817/IKRAITH-EKONOMIKA.

peningkatan input sebesar faktor x menghasilkan peningkatan output yang sama. Model ini kemudian dikembangkan menjadi model BCC oleh Banker, Charnes, dan Cooper (1984), yang mengadopsi asumsi Variable Returns to Scale (VRS) untuk mengakomodasi kondisi di mana unit tidak beroperasi pada skala optimal akibat faktor seperti persaingan pasar atau keterbatasan keuangan.⁹

Pemilihan variabel didasarkan pada pendekatan intermediasi, Pendekatan intermediasi adalah pendekatan pengukuran efisiensi lembaga keuangan yang memosisikan lembaga tersebut sebagai perantara yang menyalurkan dana dari unit ekonomi yang memiliki kelebihan dana (surplus) ke unit yang membutuhkan dana (deficit). Pendekatan intermediasi digunakan dalam penelitian karena mempertimbangkan fungsi vital bank sebagai financial intermediation yang menghimpun dana dari surplus unit dan menyalurkannya kepada deficit unit.¹⁰

Pertimbangan lainnya adalah karakteristik dan sifat dasar bank yang melakukan transformasi asset yang berkualitas dari simpanan yang dihimpun menjadi kredit yang disalurkan ke masyarakat. Input yang digunakan yaitu DPK, Beban operasional dan Total Aset sedangkan Outputnya yaitu Pembiayaan syariah dan Pendapatan operasional. DPK dipilih karena merupakan sumber dana utama yang dihimpun BPRS, penggunaan DPK sebagai input memungkinkan pengukuran seberapa efisien BPRS dalam memanfaatkan dana pihak ketiganya untuk menghasilkan output yang maksimal. Beban operasional

⁹ Dahlan Abdullah and Meilyana Dkk, *Penerapan Metode Data Envelopment Analysis Untuk Pengukuran Efisiensi Kinerja* (SEFA BUMI PERSADA, 2020).

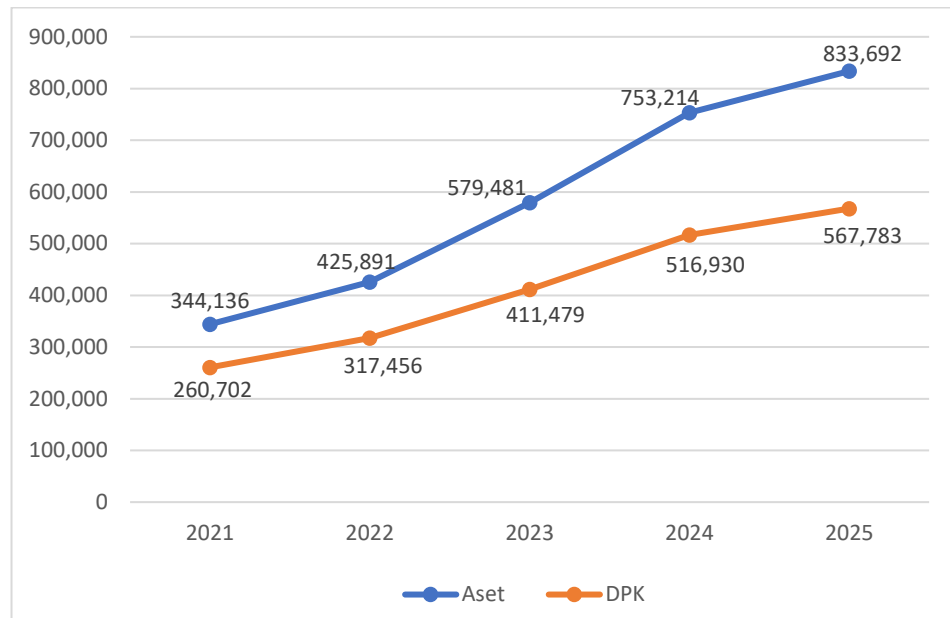
¹⁰ Willyanto Kartiko Kusumo and Abdul Karim, 'Pengembangan Model Parametrik Metode DEA Dalam Mengukur Tingkat Efisiensi Biaya Pada Perbankan Syariah Di Kota Semarang', *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 19 (2017).

mewakili biaya sumber daya manusia yang menjalankan operasional BPRS, variabel ini dimasukkan untuk menilai efisiensi pengelolaan SDM. Total Aset digunakan untuk melihat seberapa optimal pemanfaatan aset fisik dalam menghasilkan output. Pembiayaan syariah digunakan sebagai output variabel ini dipilih untuk mengukur seberapa besar kemampuan BPRS dalam mengkonversi input menjadi penyaluran dana. Pendapatan Operasional digunakan untuk tidak hanya melihat kuantitas pembiayaan saja tetapi juga kualitasnya, dengan memasukkan variabel ini, analisis dapat menilai efisiensi BPRS secara menyeluruh baik dari sisi volume maupun kinerja keuangan.¹¹

Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) di Sumatera Barat pada saat ini berjumlah 14 unit yang masih aktif yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), termasuk PT BPRS Gajah Tongga Koto Piliang, PT BPRS Jam Gadang, serta PT BPRS Al-Makmur, dengan operasional tersebar di kabupaten-kabupaten seperti Bukittinggi, Agam, dan wilayah sekitarnya. BPRS memainkan peran krusial dalam menggerakkan perekonomian daerah, walaupun dihadapkan pada kendala seperti proses merger dan penutupan sebagian BPR konvensional terkait.

¹¹ Anita Puspitasari, Purnomo Didit, and Triyono, 'Penggunaan Data Envelopment Analysis (DEA) Dalam Pengukuran Efisiensi Bank Umum Syariah Di Indonesia', *Jurnal Bisnis*, 5.2 (2017), pp. 293–304

Berikut perkembangan Aset dan Dana Pihak Ketiga (DPK) BPRS di Sumatera Barat Tahun 2021-2025 :



Gambar1.1 Grafik Perkembangan Aset dan DPK BPRS di Sumatera Barat Tahun 2021-2025

Sumber : Statistik perbankan syariah, OJK, di olah 2026

Grafik diatas menggambarkan tren peningkatan aset dan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang stabil sepanjang periode 2021 hingga 2025. Total aset meningkat dari Rp 344.136 juta pada 2021 menjadi Rp 833.692 juta pada 2025, sementara DPK naik dari Rp 260.702 juta menjadi Rp 567.783 juta pada periode yang sama. Dinamika antara kedua variabel ini menjadi indikator penting dalam mengevaluasi efisiensi operasional serta strategi pengelolaan permodalan BPRS. Data menunjukkan adanya pergeseran dalam struktur pendanaan, di mana rasio DPK terhadap total aset menyusut dari kisaran 75% di tahun 2021 menjadi sekitar 68% pada tahun 2025.

Pada Gambar 1.1 meskipun sudah terlihat adanya peningkatan aset dan DPK BPRS di Sumatera Barat, masih diperlukan kajian lebih mendalam untuk menilai apakah pertumbuhan tersebut telah diikuti oleh pengelolaan yang efisien. Perlu diteliti lebih lanjut apakah kenaikan input berupa aset dan DPK benar-benar mampu menghasilkan output berupa pembiayaan dan pendapatan operasional secara optimal. Hal inilah yang menjadi dasar pentingnya penelitian analisis perbandingan efisiensi operasional antar BPRS di Sumatera Barat.

Beberapa penelitian terdahulu sudah meneliti tingkat efisiensi BPRS, Penelitian Almahdaly & Sussana, 2025 menyatakan hanya 6 dari 33 BPRS Jawa Timur mencapai efisiensi penuh 100% (2022–2024)¹².Selanjutnya penelitian Maripatul & Maulida, 2022 mencatat fluktuasi efisiensi BPR/BPRS Sumatra (2016–2021) yang turun tajam karena Covid-19, dengan Lampung dan Sumut tertinggi.¹³ Lalu penelitian Naufal dan Firdaus, 2017 melaporkan kenaikan efisiensi BPRS Jabodetabek dari 82% (2015) ke 88% (2016), dipengaruhi negatif oleh CAR.¹⁴

Penelitian ini memiliki kebaruan karena memfokuskan analisis pada efisiensi operasional BPRS di Sumatera Barat dengan periode terbaru 2021-2025. Fokus ini memberikan pembaruan dari penelitian terdahulu yang masih banyak meneliti wilayah lain atau periode yang berbeda. Penelitian ini

¹² Habib Almahdaly and Marlina Sussana, 'Penganalisisan Kinerja (BPRS) Wilayah Jawa Timur Dengan Metode Data Envelopment Analisis (DEA) Periode 2022-2024', *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 5.6 (2025), pp. 1740–51 <<http://cerdika.publikasiindonesia.id/index.php/cerdika/index>>

¹³ Mimma Maripatul Uula and Syahdatul Maulida, 'The Efficiency of BPR / S Industry in Sumatra , Indonesia : Covid-19 Impact , Dual Banking , And Regional Analysis', *Tamkin Journal*, 1.1 (2022).

¹⁴ Fadhil Muhammad Naufal and Achmad Firdaus, 'Analisis Efisiensi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Wilayah Jabodetabek Dengan Pendekatan Two Stage Data Envelopment Analysis (Dea)', *Jurnal Ekonomi Syariah*, 5.2 (2017), pp. 196–220.

memberikan kebaruan untuk membandingkan efisiensi operasional BPRS secara khusus di wilayah Sumatera Barat, dengan memanfaatkan data terbaru periode 2021- 2025. Penelitian ini diharapkan mengungkap faktor penyebab inefisiensi sehingga dapat dirumuskan kebijakan perbaikan untuk meningkatkan efisiensi BPRS yang belum efisien. Dengan demikian, berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti tentang **“Analisis Perbandingan Efisiensi Operasional BPRS di Sumatera Barat Menggunakan Metode Data Envelopment Analysis (DEA) Periode 2021-2025”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat efisiensi operasional BPRS di Sumatera Barat periode 2021-2025?
2. Apakah terdapat perbedaan signifikan efisiensi operasional antar kelompok BPRS di Sumatera Barat?

C. Batasan Masalah

Untuk dapat memperjelas ruang lingkup masalah yang akan dibahas dan agar penelitian ini dilakukan secara terarah, maka terdapat batasan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian ini berfokus pada pengukuran efisiensi operasional Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang beroperasi di Sumatera Barat.
2. Penelitian ini hanya berfokus pada periode 2021-2025

3. Penelitian ini hanya menggunakan variabel input dan output yang diambil dari laporan keuangan BPRS. Menggunakan pendekatan intermediasi yaitu Input dalam penelitian ini adalah Dana pihak ketiga (DPK), Beban operasional, dan Total Aset, sedangkan output adalah Pembiayaan syariah dan pendapatan operasional.
4. Menggunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA) model BCC dengan asumsi Variabel Return to Scale (VRS) untuk mengukur Efisiensi Operasional BPRS.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui tingkat efisiensi operasional Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) di Sumatera Barat Periode 2021-2025.
2. Untuk Mengetahui perbedaan signifikan efisiensi operasional antar kelompok BPRS di Sumatera Barat Periode 2021-2025.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memperkaya literatur efisiensi perbankan syariah di tingkat regional, khususnya BPRS Sumatera Barat, dengan aplikasi DEA yang menggunakan model BCC dengan asumsi *Variabel Return to Scale* (VRS) untuk menguji asumsi skala efisiensi. Hasilnya dapat menjadi referensi metodologi bagi studi serupa di daerah lain Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Manajemen BPRS

Penelitian ini menyediakan acuan BPRS berkinerja efisien tertinggi untuk dijadikan patokan perbaikan operasi, misalnya pengelolaan optimal dana pihak ketiga (DPK) dan penyaluran pembiayaan, guna memperkuat posisi kompetitif di Sumatera Barat.

b. Bagi Regulator (OJK/BI)

Memberikan masukan kebijakan yang didukung data empiris untuk pengawasan BPRS, seperti penyelenggaraan pelatihan efisiensi bagi BPRS dengan skor DEA rendah.

c. Bagi Nasabah

Menyajikan data terpercaya untuk memilih BPRS yang efisien dalam layanan tabungan dan pembiayaan syariah, sekaligus mendorong inklusi keuangan di wilayah lokal pasca-pandemi.

F. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memahami dan mempermudah penyusunan proposal skripsi ini, maka penulisan proposal ini disusun dalam lima bab, yang masing-masing bab terdiri dari:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini berisikan mengenai penjelasan tentang deskripsi teori terkait efisiensi operasional, metode Data Envelopment Analysis (DEA), bank perekonomian rakyat syariah, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan tentang jenis dan pendekatan penelitian, populasi dan sampel penelitian, sumber data penelitian, variabel dan definisi operasional, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data yang akan digunakan.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan mengenai gambaran umum objek penelitian, perhitungan efisiensi BPRS di Sumatera Barat dengan Metode Data Envelopment Analysis, analisis cluster, uji asumsi kalsik, uji one-way ANOVA dan pembahasan dari hasil penelitian ini.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisikan mengenai Kesimpulan, keterbatasan dan rekomendasi penelitian lanjutan.

UIN IMAM BONJOL
PADANG